

KIPRAH POLITIK PAGUYUBAN PASUNDAN PERIODE 1927-1959

Andre Bagus Irshanto, S.Pd

Alumni Departement Pendidikan Sejarah , FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia
andreirshanto@rocketmail.com

Abstract: *This thesis entitled “KIPRAH POLITIK PAGUYUBAN PASUNDAN PERIODE 1927-1959”. The author takes the topic of Paguyuban Pasundan with the above title, because it is based on the results of the study of literature by the author, that there is still the lack of works that discuss Paguyuban Pasundan, especially about political activities. The main issues that will be raised in this thesis is that Paguyuban Pasundan is not limited active in social and cultural sectors but also actively engaged in politics. Based on the main issue can be developed into three formulation of research: 1) What is the background to the Paguyuban Pasundan ? 2) How is the political role of the Paguyuban Pasundan period 1927-1959 ? 3) How is the end of political struggle Paguyuban Pasundan in 1959 ? The method used is the historical method which consists of four stages, namely Heuristic, Criticism, Interpretation, Historiography, and to be helped by using an interdisciplinary approach from the social sciences (especially of Sociology and Politics). The technique that author uses is the study of literature related to the theme of the author analyzed. Based on the results of the study of literature by the author, Paguyuban Pasundan period 1927-1959 has an important role, especially in the political field. In the period 1927-1942 establishing PPPKI, GAPI and active in the Volksraad. The period of 1942-1945 some of its members active in the formation of Japanese agencies such as newspapers Tjahaja, PETA and Java Hokokai. Period 1945-1950 actively opposed the establishment of Negara Pasundan founded by the Dutch and the last period of 1950-1959 which Paguyuban Pasundan involvement in the 1955 general election.*

Keywords : Paguyuban Pasundan, PPPKI, GAPI, Negara Pasundan

Abstrak: *Penelitian berjudul “KIPRAH POLITIK PAGUYUBAN PASUNDAN PERIODE 1927-1959”. Penulis mengambil topik tentang Paguyuban Pasundan dengan judul di atas, karena berdasarkan hasil studi literatur yang penulis lakukan, bahwa masih minimnya karya yang membahas tentang Paguyuban Pasundan, terutama tentang kiprah politiknya. Masalah utama yang akan diangkat dalam Skripsi ini adalah bahwa Paguyuban Pasundan tidak sebatas aktif dalam bidang sosial budaya saja, namun aktif pula bergerak dalam bidang politik. Berdasarkan masalah utama tersebut dapat dikembangkan menjadi tiga rumusan penelitian, yaitu 1). Apa yang menjadi latar belakang lahirnya Paguyuban Pasundan ? 2). Bagaimana peran politik Paguyuban Pasundan periode 1927-1959 ? 3). Bagaimana akhir perjuangan politik Paguyuban Pasundan pada tahun 1959 ? Metode yang digunakan adalah metode historis yang terdiri dari empat tahapan yaitu : Heuristik, Kritik, Interpretasi, Historiografi, dan dibantu pula dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dari ilmu-ilmu sosial (terutama dari Sosiologi dan Politik). Adapun teknik yang penulis gunakan adalah studi literatur yang berhubungan dengan tema yang penulis kaji. Berdasarkan hasil studi literatur yang penulis lakukan, bahwa Paguyuban Pasundan pada periode tahun 1927-1959 memiliki peran yang cukup penting terutama dalam bidang politik. Pada periode 1927-1942 mendirikan PPPKI, GAPI dan aktif di Volksraad. Periode 1942-1945 sebagian anggotanya masuk kedalam badan-badan bentukan Jepang seperti surat kabar Tjahaja, PETA dan Jawa Hokokai. Periode 1945-1950 aktif menentang berdirinya Negara Pasundan yang didirikan oleh Belanda dan yang terakhir periode 1950-1959 yaitu keterlibatan Paguyuban Pasundan dalam PEMILU 1955.*

Kata Kunci : Paguyuban Pasundan, PPPKI, GAPI, Negara Pasundan

PENDAHULUAN

Paguyuban Pasundan adalah sebuah organisasi berdasarkan etnis Sunda yang tumbuh dan berkembang di Jawa Barat yang berumur panjang dan masih tegak hingga sekarang, sementara organisasi-organisasi lain yang sezaman dengan Paguyuban Pasundan, sudah lama mati. Dengan perjalanan sejarah yang cukup panjang, Paguyuban Pasundan telah memberikan kontribusi yang cukup penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia

Namun tidak banyak tulisan yang mengangkat mengenai sikap, tindakan serta usaha-usaha yang telah dilakukan Paguyuban Pasundan. Tulisan-tulisan yang ada, kajiannya tidak mendalam, ruang lingkup pembahasan bersifat luas, serta rentang waktu yang lebih panjang yaitu antara tahun 1913 sampai dengan tahun 1990. Sedangkan tulisan yang khusus mengkaji tentang kiprah perjuangan politik Paguyuban Pasundan pada periode 1927-1959, belum ada.

Ditinjau dari sejarahnya, menurut pendapat penulis periode 1927-1959 adalah periode yang penting, karena pada periode tersebut Paguyuban Pasundan telah benar-benar memasuki panggung politik, dan arah perjuangan politik Paguyuban Pasundan telah berwawasan kebangsaan dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia.

Sehubungan dengan masih kurangnya informasi berkenaan dengan kiprah politik Paguyuban Pasundan tersebut, mengakibatkan masyarakat Sunda pada umumnya hanya mengenal Paguyuban Pasundan sebagai organisasi berbasis etnis Sunda yang bergerak di bidang sosial, budaya dan pendidikan saja. Bahkan dalam buku teks sejarah di SMA, baik Kurikulum 2006 (KTSP) maupun Kurikulum 2013, tentang organisasi Paguyuban Pasundan tidak dibahas. Sehingga siswa-siswi sekolah menengah atas di wilayah Jawa Barat khususnya, banyak yang tidak mengetahui bahwa Paguyuban Pasundan sebagai salah satu organisasi terbesar di Jawa Barat pernah aktif di jalur politik. Sehubungan dengan kenyataan yang ada tersebut,

mendorong penulis untuk mengangkat tema skripsi tentang Paguyuban Pasundan dengan memfokuskan pada aktivitas politiknya pada periode 1927-1959

Teori yang digunakan dalam Skripsi ini adalah Teori Struktural Konflik yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser, "bahwa sebuah konflik itu adalah suatu hal yang fungsional dalam kehidupan masyarakat, dan juga konflik berfungsi sebagai alat untuk mengakselerasi perubahan sosial. Juga dengan adanya sebuah konflik akan memperkuat dan mempertegas integritas sosial, serta memperjelas atau memberikan batasan yang jelas terhadap kelompok out grup dan in grup dalam sebuah kelompok sosial" (Upe, 2010, hal 169). Selain itu pula dalam Skripsi ini menggunakan Teori Struktural Fungsional, yang intinya :

1. Organisme perilaku, yaitu sistem tindakan yang melakukan fungsi sistem adaptasi dengan menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal.
2. Sistem kepribadian, yaitu melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya.
3. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya.
4. Sistem kultur melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor, seperangkat norma dan nilai yang menjadi motivasi dalam bertindak (Upe, 2010, hal 118).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Skripsi ini adalah metode historis, dengan merujuk pada pendapat Nugroho Notosusanto, yaitu bahwa dalam penelitian sejarah terdapat 4 tahapan sebagai berikut :

- 1 Heuristik, yakni sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang sejarawan dalam menghimpun sumber-sumber sejarah

(berupa jejak-jejak masa lampau) yang relevan dengan judul penelitian.

2. Kritik sumber (baik eksternal maupun internal), yakni kegiatan yang dilakukan oleh sejarawan dalam menyelidiki apakah sumber sejarah (jejak-jejak sejarah) itu otentik dan dapat dipertanggung jawabkan, baik bentuk ataupun isinya.
3. Interpretasi (penafsiran), yakni kegiatan yang dilakukan oleh sejarawan untuk menetapkan makna (berdasarkan bantuan dari konsep dan teori ilmu-ilmu sosial) yang saling berhubungan daripada fakta-fakta yang diperoleh.
4. Tahap terakhir adalah Historiografi, yakni kegiatan yang dilakukan oleh sejarawan berupa penyampaian sintesa yang dituangkan dalam bentuk kisah (Notosusanto, 1964, hal 22-23).

Pada tahapan Heuristik, penulis menggunakan sumber yang berasal dari karya ilmiah dan buku-buku baik dari koleksi pribadi, Perpustakaan Pusat UPI, Perpustakaan Batu Api Jatinangor dan Perpustakaan daerah Jawa Barat. Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak menggunakan sumber primer (berupa arsip) dengan pertimbangan bahwa, “dengan sumber sekunder sudah dapat memahami secara tepat dan mendalam mengenai latar belakang sumber-sumber dan dokumen sezaman, serta telah memperoleh petikan atau kutipan yang lebih lengkap dari sumber-sumber lain atau dokumen sezaman” (Daliman, 2012, hal 57).

Karena sumber yang penulis gunakan berupa sumber sekunder, sehingga pada tahapan kritik, penulis hanya melakukan kritik internal saja. Dalam melakukan kritik internal ini penulis mencoba membandingkan antara

Sumber satu dan sumber yang lain, dalam hal ini penulis membandingkan antara buku *Pagojeoban Pasoendan 1927-1942 Profil Etno Nasionalis* karya Suharto, dengan buku karya Edi S Ekadjati yang berjudul *Kebangkitan Kembali Orang Sunda*. Dalam buku Suharto dijelaskan bahwa yang menjadi latar belakang lahirnya Paguyuban Pasundan, adalah karena adanya rasa kekecewaan orang-orang Sunda yang bergabung di organisasi Budi Utomo, karena adanya diskriminasi. Sedangkan di dalam buku *Kebangkitan Kembali Orang Sunda* karya

Edi S Ekadjati, dipaparkan bahwa yang melatarbelakangi lahirnya Paguyuban Pasundan berdasarkan pernyataan dari salah seorang pendiri Paguyuban Pasundan (Dayat Hidayat), bahwa Paguyuban Pasundan lahir karena rasa keprihatinan aktivis orang-orang Sunda di Budi Utomo akan nasib orang Sunda yang jauh tertinggal dalam aspek sosial, pendidikan, dan ekonomi dibandingkan dengan suku-suku lain di Indonesia. Penulis mencoba untuk lebih objektif terhadap perbedaan data tersebut dengan mempertimbangkan beberapa aspek.

Tahap selanjutnya adalah Intepretasi (Penafsiran), yaitu memberikan sebuah tafsiran terhadap sumber-sumber yang sudah didapatkan, agar lebih bermakna dan berarti. Dalam melakukan interpretasi terhadap sumber berupa buku-buku dan karya ilmiah yang relevan, penulis menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu dengan menggunakan ilmu Sejarah sebagai disiplin ilmu utama dalam mengkaji permasalahan, dibantu oleh ilmu-ilmu sosial lainnya seperti ilmu Sosiologi dan ilmu Politik, untuk melengkapi pemahaman secara lebih utuh.

Tahap yang terakhir adalah historiografi, yaitu setelah melalui tahapan pengumpulan sumber, dan melakukan penafsiran terhadap sumber, selanjutnya sebagai tahap terakhir, hasil penelitian tersebut disusun menjadi satu kesatuan tulisan sejarah yang utuh yang dituangkan dalam bentuk sebuah laporan berupa Skripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, kondisi Hindia Belanda (Indonesia) sebagai bangsa terjajah, benar-benar dalam keadaan terbelakang hampir disemua bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial maupun pendidikan. Keadaan itu adalah sebagai dampak dari sistem politik pemerintah kolonial Belanda, yang menganggap bahwa tanah jajahan adalah sebagai objek eksploitasi. Sistem politik kolonialisme hakekatnya merupakan dominasi politik, eksploitasi ekonomi, penetrasi kebudayaan serta segregasi sosial, maksudnya adalah :

“Dominasi politik, dalam arti kekuasaan pemerintah berada di tangan penjajah yang memerintah dengan sekehendak hatinya. Dalam bidang ekonomi, penjajah melakukan eksploitasi ekonomi yang mengambil sebanyak-banyaknya kekayaan dari bumi negeri jajahan untuk kemakmuran negeri penjajah. Dalam bidang kebudayaan, penjajah melakukan penetrasi dengan berbagai cara, halus dan paksaan, sehingga sangat merugikan kehidupan budaya bangsa setempat. Dalam bidang sosial, penjajah menciptakan diskriminasi sosial yang menempatkan bangsa penjajah pada kedudukan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa terjajah yang dianggap bangsa kelas rendah” (Utomo, 1995, hal 2-3).

Politik kolonial dan sistem kapitalisme yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda, benar-benar telah menyengsarakan rakyat jajahan. Situasi dan kondisi yang telah diciptakan oleh pihak kolonial Belanda tersebut, telah menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat bumi putera untuk memperbaiki keadaan negerinya yang sangat memprihatinkan, dengan memajukan taraf kehidupan bangsa mereka sendiri terutama melalui cara pendidikan (Ekadjati, 2004, hal 17).

Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya untuk mendapatkan pendidikan modern di kalangan penduduk pribumi tersebut tumbuh sejalan dengan mulai diberlakukannya politik etis (politik balas budi) di Hindia Belanda, yang salah satu programnya adalah pengembangan pendidikan bagi kalangan bumi putera. Adanya kesempatan memperoleh pendidikan barat tersebut telah melahirkan kaum elite baru. Golongan elite baru inilah yang kemudian menjadi pelopor pergerakan nasional (Utomo, 1995, hal 42).

Organisasi yang pertama dibentuk setelah dicetuskannya politik etis adalah Budi Utomo. Organisasi ini didirikan oleh para pemuda terdidik yang diprakarsai oleh dr. Wahidin Sudiro Husodo, dan dr. Soetomo, pada tanggal 20 Mei 1908. Walaupun organisasi ini masih bersifat

kedaerahan. Organisasi ini juga telah mendorong lahirnya organisasi-organisasi lainnya seperti Indische Partij, Sarekat Islam (SI), Paguyuban Pasundan, Partai Nasional Indonesia (PNI), ada juga Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan lain-lain.

Organisasi-organisasi yang tumbuh pada masa pergerakan, masih diwarnai pula oleh organisasi-organisasi yang bersifat etnis (kedaerahan), termasuk di dalamnya adalah Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan didirikan pada tanggal 20 Juli tahun 1913, sebagai hasil dari pertemuan sejumlah orang dengan latar belakang etnis Sunda, yaitu siswa-siswa HBS, KWS, STOVIA, guru-guru, dan lain-lain yang bertempat tinggal di Jakarta dan Bogor. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Dayat Hidayat, dan mendapat dukungan dari D.K. Ardiwinata serta tokoh Sunda lainnya yang tinggal di Jakarta (Suharto, 2002, hal 47).

Pada awalnya kegiatan Paguyuban Pasundan berorientasi pada bidang sosial, budaya serta pendidikan. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, sehubungan dengan dibentuknya *Volksraad* (lembaga perwakilan rakyat) oleh Belanda, terjadilah perubahan asas pada Anggaran Dasar Paguyuban Pasundan yang memperluas ruang lingkup kegiatan organisasi, sehingga mencakup pula kegiatan-kegiatan politik. Secara bertahap mulai tahun 1919, Paguyuban Pasundan merubah perhatian dan kegiatannya ke arah dunia politik (Suharto, 2002, hal 132).

Ketika awal berdirinya sampai tahun 1929, struktur kepeguruan Paguyuban Pasundan masih sangat sederhana hanya terdapat komisar, presiden, wakil presiden, sekretaris, dan bedahara, dan belum dibentuk komisi-komisi. Baru pada tahun 1929 debentuklah komisi-komisi yang membidangi orangan-organ yang ada di Paguyuban Pasundan. Alasan yang mendasar mengapa dibentuknya komisi-komisi, adalah karena Paguyuban Pasundan sudah meluaskan kiprahnya, tidak hanya di bidang sosial budaya namun juga mulai merambah ke bidang politik. Selain itu pula karena semakin banyaknya cabang Paguyuban Pasundan yang tersebar hampir diseluruh Jawa Barat, sehingga diperlukan komisi-komisi untuk mengatur bidang-bidang yang digeluti oleh Paguyuban Pasundan.

Paguyuban Pasundan menitik beratkan perjuangannya dilakukan melalui wakil-wakilnya yang duduk di dewan-dewan perwakilan (Dewan Kabupaten, Dewan Kota, Dewan Provinsi, dan *Volksraad*). Melalui dewan-dewan rakyat, upaya yang dilakukan wakil-wakil Paguyuban Pasundan awalnya adalah menuntut dapat berpartisipasi di dalam pemerintahan, kemudian berjuang dalam menuntut kemerdekaan (Suharto, 2002, hal 80). Ketika awal bergabung dengan *Volksraad* pada tahun 1919 sampai tahun 1921 Paguyuban Pasundan belum memiliki wakil secara langsung dan memitipkan aspirasinya kepada menak pangreh praja atau kepada Fraksi Nasional yang diketuai Moh Husni Thamrin. Setelah tahun 1921 Paguyuban Pasundan memiliki wakilnya sendiri di *Volksraad*.

Paguyuban Pasundan turut dalam pendirian sebuah badan federasi yang bernama Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI), bersama-sama dengan Partai Sarekat Islam, PNI, Budi Utomo, *Indonesische Studie Club*, Serikat-Serikat Sumatra, dan Kaum Betawi, pada rapat yang diselenggarakan tanggal 17-18 Desember 1927 di Bandung. Tujuan PPPKI antara lain: “menyamakan arah aksi kebangsaan, memperkuatnya dengan memperbaiki organisasi, dengan kerjasama antara anggota-anggotanya, serta menghindarkan perselisihan sesama anggota-anggotanya yang hanya bisa melemahkan aksi kebangsaannya” (Sutjiatiningsih, 1983, hal 20). Sejak bergabung dengan PPPKI, kiprah Paguyuban Pasundan selain dalam lingkup lokal Jawa Barat, juga sudah lebih luas meliputi lingkup nasional.

Setelah bergabung kedalam PPPKI, Paguyuban Pasundan juga turut berperan dalam peristiwa politik baik yang terjadi di dala negeri maupun luar negeri, seperti memberikan dukungan terhadap empat orang mahasiswa Indonesia yang berasal dari Perhimpunan Indonesia (Moh. Hatta, Abdoel Madjid Djojodiningrat, Ali Sastroamindjojo, dan Nazir St. Pamoentjak) dengan cara mengutus Bakrie Soeriatmadja untuk memberikan pidato dukungan dan simpati. Selain itu, Paguyuban Pasundan juga melakukan kasi politiknya ketika peristiwa penggeledahan besar-besaran dan

penangkapan terhadap empat pimpinan PNI pada Desember 1929, yaitu Soekarno, Maskoen, Gatot Mangkoepraja, dan Soepriadinata, yang kemudian diajukan ke pengadilan di Bandung, dengan tuduhan melakukan kegiatan usaha penggulingan kekuasaan Hindia Belanda. Sebagai tanda simpati Paguyuban Pasundan terhadap peristiwa penggeledahan itu, Paguyuban Pasundan memberikan bantuan berupa tenaga ahli hukum yaitu R. Idih Prawiradipoetra.

Setelah PPPKI dibubarkan, aktivitas politik Paguyuban Pasundan lebih dititik beratkan melalui dewan-dewan terutama di *Volksraad*. Pada periode tahun 1935-1942, organisasi organisasi kooperatif menjalankan taktik-taktik parlementer yang moderat, karena kondisi di dalam *Volksraad* dianggap relatif bebas dan aman sebagai tempat menyatakan pendapat politik, yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Gebrakan yang dilakukan oleh organisasi organisasi kooperatif di dalam *Volksraad* diantaranya adalah dengan mengajukan petisi, yang diusulkan oleh Soetardjo pada tanggal 15 Juli 1936 (dikenal sebagai Petisi Soetardjo).

Dukungan Paguyuban Pasundan terhadap masalah-masalah politik yang berskala nasional terus meningkat terutama setelah berdirinya GAPI (Gabungan Politik Indonesia), yang didirikan pada 21 Mei 1939, berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Mohammad Hoesni Thamrin, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Parindra, PSII, Partai Katolik, Persatuan Minahasa dan Partai Islam Indonesia (PII). Wakil-wakil dari Paguyuban Pasundan yang hadir dalam rapat tersebut adalah Atik Soeardi, S. Soeradiredja dan Ir. Oekar Bratakoesoemah. Tujuan dari GAPI ini adalah memperjuangkan hak untuk dapat menentukan nasib sendiri dan persatuan nasional, yang kemudian tujuan tersebut dirumuskan dalam semboyan “Indonesia Berparlemen“, yang bermakna bahwa GAPI ingin adanya parlemen sepenuhnya.

Perjuangan politik Paguyuban Pasundan juga dilakukan melalui media surat kabar yaitu “Sipatahoenan” dan “Langlajang Domas”, yang terbit pada awal dekade 1920-an. Sipatahoenan adalah surat kabar yang diterbitkan oleh Paguyuban Pasundan cabang Tasikmalaya, dan pertama

kali terbit pada tahun 1923. Setahun kemudian (1924), Sipatahoenan dipindahkan ke Bandung, sedangkan Paguyuban Pasundan cabang Tasikmalaya menerbitkan surat kabar baru yaitu Langlajang Domas. Kedua surat kabar tersebut, baik Sipatahoenan maupun Langlajang Domas, sama-sama dijadikan sebagai corong politik bagi Paguyuban Pasundan baik yang ada di pusat maupun daerah. Surat kabar Langlajang Domas milik Paguyuban Pasundan cabang Tasikmalaya selalu mengabarkan isu-isu politik terutama hasil-hasil sidang yang berlangsung di *Volksraad* yang dipimpin oleh Soetisna Sendjaja seorang anggota *Volksraad* (Falah, 2010, hal 269).

Dengan hadirnya surat kabar Sipatahoenan ini menjadi bentuk corong politik Paguyuban Pasundan, sekaligus sebagai sebuah bentuk pendidikan politik bagi masyarakat saat itu mengenai kondisi perpolitikan Indonesia dan dunia. Sampai tahun 1915 Paguyuban Pasundan telah berhasil mendirikan cabang di Tasikmalaya, diikuti dengan pembukaan cabang di Bandung, Cianjur, Bogor, dan Purwakarta. Cabang-cabang di wilayah Jawa Barat tersebar di kota-kota, kabupaten, kewedanaan, kotapraja hingga kecamatan. Cabang-cabang yang paling banyak anggotanya terdapat di Priangan (terutama di Tasikmalaya), sedangkan yang paling sedikit anggotanya terdapat di Indramayu dan Banten. Sampai akhir tahun 1933, cabang Tasikmalaya beranggotakan 419. Selain di Priangan dan Jakarta, Paguyuban Pasundan membuka cabang di Keresidenan Karawang, yang terdapat di lima daerah yaitu : Purwakarta, Karawang, Subang, Pegaden, dan Pamanukan. Paguyuban Pasundan di Keresidenan Karawang ini kurang berkembang seperti yang diharapkan, walaupun sudah dilakukan berbagai propaganda. Perekrutan anggota baru di daerah Jatisari dan Jatiragas (Onderdistrik Jatisari, Distrik Cikampek), yang dilakukan oleh Ketua cabang Paguyuban Pasundan Karawang yaitu Thamrin, juga tidak berhasil karena kurang mendapat sambutan yang baik dari masyarakat di Keresidenan Karawang (Lubis N.H, 2011, hal 158).

Pada masa pendudukan Jepang aktivitas Paguyuban Pasundan sempat

terhenti pada masa penjajahan Jepang, karena adanya larangan bagi organisasi-organisasi pergerakan untuk melakukan kegiatan politik berdasarkan *Osamu Serei* No 3 Tahun 1942. Untuk memperjelas UU *Osamu Serei*, maka pada bulan Agustus 1942 diterbitkan di Surat kabar "Soeara Asia" :

"Pemerintah militer Jepang hanya mengizinkan kepada rakyat Indonesia untuk mengadakan organisasi-organisasi hanya dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan dengan syarat tidak membicarakan masalah ketatanegaraan" (Lubis N. H., 2003, hal 188).

Walaupun secara keorganisasian Paguyuban Pasundan vakum, namun para anggotanya masuk kedalam organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang, seperti Otto Iskandardinata yang masuk kedalam surat kabar Tjahaja, Jawa Hokokai, mendirikan PETA di Jawa Barat, dan Chou Sang In .

Pada tahun 1947 di Yogyakarta diumumkan berdirinya kembali Paguyuban Pasundan dengan nama Paguyuban Pasundan Republik Indonesia (PPRI), yang diketuai oleh Ir. Mochammad Enoch, seorang pemuka Paguyuban Pasundan yang menjabat sebagai walikota Yogyakarta (Ramelan, 1983, hal 54). PPPRI ini lahir sebagai bentuk reaksi atas lahirnya PRP (Partai Rakyat Pasundan) yang didirikan pada 18 November 1946 di Bandung oleh Soerja Kartalegawa (mantan Bupati Garut), bersama dengan segelintir orang Sunda yang mendapatkan sokongan dari Belanda, yang bertujuan untuk mendirikan Negara Pasundan, PRP sangat giat menghidupkan sukuisme Sunda. Karena PRP ini mengatasnamakan rakyat Pasundan, para tokoh Paguyuban Pasundan bertekad untuk menghancurkan PRP yang bersifat separatistis yang telah menodai perjuangan Paguyuban Pasundan (mendukung NKRI).

Gerakan PRP dan Negara Pasundannya tak bertahan lama, karena di dalam gerakan PRP ini hanya mengandalkan Soerja Kartalegawa saja, dan sosoknya bukanlah tokoh yang berpengaruh di Jawa Barat. Akhirnya Belanda menarik

dukungannya terhadap PRP . Oleh sebab itu dalam usaha Belanda untuk membangun negara bagian di Jawa Barat (Negara Pasundan), kemudian melibatkan berbagai lapisan masyarakat yang ada di Jawa Barat, melalui Konferensi Jawa Barat. Sebagai persiapan pembentukan Negara Pasundan ini melalui jalan yang panjang, dengan dua kali konferensi persiapan yaitu pada bulan Oktober dan Desember 1947. Selanjutnya dalam konferensi Jawa Barat ketiga, yang diselenggarakan pada tanggal 23 Februari-5 Maret 1948, di Bandung. Konferensi Jawa Barat ketiga ini menghasilkan beberapa poin penting mengenai pendirian Negara Pasundan, yaitu terpilihnya R.A.A Wiranatakoesoema (mantan Bupati Bandung) sebagai Wali Negara, serta Adil Poeradiredja sebagai Perdana Menteri, kedua tokoh tersebut termasuk anggota kehormatan dari Paguyuban Pasundan.

Setelah didirikan Negara Pasundan berdasarkan hasil konferensi Jawa Barat ketiga, banyak mendapatkan protes. Penolakan atas berdirinya Negara Pasundan dilakukan juga di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat, seperti di daerah Cirebon, Bogor, Tasikmalaya, Bekasi, Cianjur, dan Bandung dengan tuntutan yang sama yaitu bubarkan Negara Pasundan. Dari beberapa kota yang ada di Jawa Barat, aksi yang paling berani dan dinilai heroik dalam melakukan penolakan terhadap Negara Pasundan, adalah yang terjadi di Bandung sebagai Ibu kota Negara Pasundan, karena berani menduduki gedung parlemen. Pada saat itu di Parlemen sedang berlangsung sidang wakil-wakil daerah Jawa Barat, membahas mengenai status Jawa Barat. Demonstrasi pada tanggal 8 Maret 1950 ini diikuti oleh beribu-ribu masyarakat Jawa Barat, yang sebelumnya melakukan arak-arakan keliling kota Bandung, dengan membentangkan spanduk bertuliskan slogan-slogan yang berisikan tuntutan pembubaran Negara Pasundan, dan tuntutan pengembalian Jawa Barat kedalam kekuasaan Republik Indonesia (Ba'in, 1996, hal 139).

Untuk menepis opini negatif dan kritikan dari masyarakat Sunda terutama dari kalangan pemuda, mengenai sikap R.A.A Wiranatakoesoema yang mau dilantik sebagai Wali Negara Negara Pasundan tersebut, maka pada tanggal 4

Maret 1948 ketika proses pelantikan, Wiranatakoesoema melakukan pidato singkat selaku Wali Negara Negara Pasundan yang, intinya berisi pembelaan Wiranatakoesoema yang berjiwa republik sejati dan tidak menghendaki Jawa Barat terpisah dari Republik Indonesia dan cara yang ditempuhnya ini hanya sebuah strategi saja.

Berdiri dan bubarinya Negara Pasundan baik yang pertama ("Kartalegawa"), maupun yang kedua ("Wiranatakoesoema"), diwarnai dengan adanya konflik internal di antara kelompok menak (Mulyana, 1999, hal 152). Walaupun dalam pembentukan Negara Pasundan ("Kartalegawa") maupun Negara Pasundan ("Wiranatakoesoema"), sama-sama disokong oleh Belanda, terdapat dua kubu yang berbeda pendapat. Pertama yang menolak secara keras berdirinya Negara Pasundan, golongan ini berasal baik dari kalangan Menak Nasionalis maupun menak Pangreh Praja yang bersikap Republikan. Kedua, yang mendukung berdirinya Negara Pasundan, yaitu kaum menak yang bersifat federalis, yang memanfaatkan kondisi untuk mempertahankan kekuasaan tradisionalnya, dengan ikut terlibat dalam kabinet Negara Pasundan.

Selain banyak aksi protes dari rakyat Jawa Barat yang mempercepat pembubaran Negara Pasundan, adalah keterlibatan salah satu anggota kabinet Negara Pasundan yaitu Anwar Tjokroaminoto dan Adil Puradiredja di dalam sebuah gerakan yang bernama APRA (Angkatan Perang Ratu Adil). Dibalik layar gerakan ini dikomandoi oleh Sultan Hamid II seorang menteri Negara dari kabinet RIS yang berasal dari BFO (*Bijeenkomst voor Federale Overleg*/pertemuan untuk musyawarah federal). Tujuan sebenarnya dari gerakan ini adalah untuk menculik Menteri Pertahanan dan Keamanan yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX; Sekjen Pertahanan Mr. Ali Budiardjo; dan pejabat Kepala Staf Angkatan Darat, Kolonel T.B Simatupang. Gerakan APRA yang dipimpin Kapten Westerling, dimulai pada tanggal 23 Januari 1950, namun gerakan ini dapat ditumpas dan dipatahkan oleh Divisi Siliwangi bekerjasama dengan masyarakat pedesaan di Jawa Barat.

Memasuki masa Demokrasi liberal, PPPRI berganti nama menjadi Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI) berdasarkan kongres pada tanggal 29 Desember 1949 - 4 Januari 1950, yang didalamnya membahas perubahan asas dan tujuan sesuai dengan tuntutan zaman, dan secara resmi perubahan nama tersebut dipakai tertanggal 4 Januari 1950. Ketika terjadi perubahan nama dari Paguyuban Pasundan menjadi PARKI, juga mengakibatkan perubahan terhadap anggaran dasar, asas dan tujuan yang disesuaikan dengan zaman. Secara umum tujuan dari PARKI adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di dalam suatu negara yang berdaulat, adil dan demokratis yang berdasarkan Pancasila.

Setelah berubah nama menjadi PARKI, ikut sebagai kontestan PEMILU tahun 1955. Sebenarnya pada tahun 1953 dua tahun sebelum PEMILU, sudah diadakan konferensi di Bogor, disana terdapat suatu usulan dari salah satu cabang PARKI untuk merubah kembali nama menjadi Paguyuban Pasundan. Adapun alasannya karena nama Paguyuban Pasundan lebih dikenal orang banyak, namun usulan ini tidak ditanggapi dan digubris oleh PARKI. Pada masa Demokrasi Liberal adalah masa akhir karir perpolitikan Paguyuban Pasundan.

Selain kegagalan didalam PEMILU 1955 yang mengakibatkan PARKI harus dikembalikan kembali namanya menjadi Paguyuban Pasundan, adalah terjadinya pertentangan-pertentangan di dalam tubuh PARKI yang berbasis ideologi, sehingga PARKI tidak dapat melakukan konsolidasi dan pembinaan dengan cabang-cabangnya di daerah. Oleh karena pertentangan di tubuh PARKI tidak dapat diselesaikan, maka pada tanggal 17, 20, dan 21 Mei 1956 diadakan sebuah kongres luar biasa.

Di dalam kongres ini dibentuk sebuah tim penyelidik yang bertugas untuk menyelidiki dan meneliti perjuangan PARKI disetiap cabangnya. Hasil dari penyelidikan tersebut menghasilkan hasil yang kurang memuaskan, maka diadakanlah referendum dalam kongres luar biasa, yang bertujuan untuk menyatukan PARKI yang mulai pecah

akibat kekalahan dalam pemilu 1955 yang amat telak di basis massanya sendiri. Maka pada tanggal 29 November 1959 berdasarkan hasil kongres, PARKI berubah kembali namanya menjadi Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan setelah tahun 1959 ini orientasi kegiatannya kembali ke tujuan awal berdirinya pada tahun 1913, yaitu bergerak dalam bidang sosial dan budaya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari Skripsi ini adalah, Paguyuban Pasundan didirikan oleh kaum terpelajar yang memiliki kesadaran akan kenyataan kehidupan bangsa mereka yang begitu memprihatinkan, baik dalam kehidupan ekonomi, pendidikan, politik maupun kesejahteraan sosial. Kesadaran tersebut muncul berkat pengetahuan dan wawasan mereka yang meningkat dan bertambah luas, sebagai buah dari pendidikan di sekolah, yang justru timbul dari kebijakan politik kolonial, yaitu Politik Etis.

Paguyuban Pasundan adalah organisasi pergerakan nasional yang berbasis etnis Sunda yang berumur panjang, dan dapat tetap mempertahankan keberadaannya, walaupun sempat dibekukan pada masa pendudukan Jepang. Paguyuban Pasundan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat Sunda khususnya. Tujuan itu hendak dicapai melalui kegiatan di bidang sosial dan budaya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, organisasi ini mulai melebarkan kegiatannya yang tidak hanya dalam bidang sosial budaya, namun sudah merambah ke dunia politik.

Paguyuban Pasundan telah melalui perjalanan yang panjang serta melalui berbagai perubahan zaman, dan sebagai organisasi pergerakan nasional, Paguyuban Pasundan pun turut berperan aktif bersama-sama dengan organisasi-organisasi pergerakan lainnya dalam berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia. Bahwa selayaknya kita bangga sebagai orang yang lahir di Jawa Barat memiliki sebuah organisasi seperti Paguyuban Pasundan, yang sangat menjunjung tinggi rasa nasionalisme dan cinta tanah air.

Paguyuban Pasundan tidak mengedepankan *Etnosentris* dan kesukuan, serta merendahkan orang yang berasal dari suku yang lain, yang dibuktikan dengan perjuangannya baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan maupun politik, bertujuan untuk memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik yang berasal dari suku Sunda maupun yang bukan suku Sunda.

Paguyuban Pasundan adalah organisasi pergerakan nasional yang berbasis etnis Sunda yang berumur panjang dan dapat tetap mempertahankan keberadaannya, walaupun sempat dibekukan pada masa pendudukan Jepang. Paguyuban Pasundan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat Sunda khususnya. Tujuan itu hendak dicapai melalui kegiatan di bidang sosial dan budaya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, organisasi ini mulai melebarkan kegiatannya yang tidak hanya dalam bidang sosial budaya, namun sudah merambah ke dunia politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ba'in. (1996). *Terbentuk Dan Runtuhnya Negara RIS 1945-1950 Tesis Program Studi Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Indonesia*. Jakarta: Tidak diterbitkan.
- Ekadjati, E. S. (2004). Paguyuban Pasundan Sebuah Kebangkitan Kembali Orang Sunda 1913-1918. dalam Edi Suhardi. Ekadjati, *Fatimah In West Java Moral Admonitions to Sundanese Gentlewomen*. Bandung : Pusat Studi Sunda.
- Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta : Ombak
- Falah, M. (2010). *Sejarah Kota Tasikmalaya 1820-1942*. Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat bekerjasama dengan Uga Tatar Sunda
- Lubis, N. H. (2003). *Sejarah Tatar Sunda Jilid 2*. Bandung: LPPM UNPAD dan MSI Cabang Jawa Barat
- Lubis, N. H. (2011). *Sejarah Kabupaten Karawang*. Karawang: Pemerintah Kabupaten Karawang
- Mulyana, A. (1999). Pergumulan Elite Sunda Pada Massa Revolusi : Kasus Berdiri dan Bubarnya Negara Pasundan 1947-1950. dalam Sri Sutjiatiningsih (Ed.), *Kongres Nasional Sejarah 1996 Subtema :PEMIKIRAN DAN ANALISIS TEKS SEJARAH II*. Jakarta: CV Ilham Bangun Karya.
- Notosusanto, N. (1964). *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*. Jakarta: Mega Bookstore.
- Ramelan, H. R. (1983). *Sejarah Pagoejoeban Pasoendan (1914-1982) Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia* Jakarta: Tidak diterbitkan.
- Suharto. (2002). *Pagoejoeban Pasoendan 1927-1942(Profil Pergerakan Etno - nasionalis)*. Bandung: Satya Historika
- Upe, A. (2010). *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Utomo, C. B. (1995). *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia (Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan)*. Semarang: IKIP Semarang Press.